

Daftar Pustaka

- Abdullah Rozali. 1999. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Abu, Sholeh Munawar.1991. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bintarto.1983. *Interaksi Desa –Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- BPS Kabupaten Simalungun Tahun 1996
- BPS Kabupaten Simalungun Tahun 2011
- BPS Kabupaten Simalungun Tahun 2013
- Hastuti, Retno. 2012. *Atlas Tematik Kabupaten Simalungun*. Klaten :Intan Pariwara.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ivancevich, John M dkk. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Simalungun
- Milen, Anneli .2004. *Pengangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Muchlas, Makmuri. 2008. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Oentarto S.M dkk. 2004. *Menggagas Format Otonomi Dearah Masa Depan*. Jakarta: Samitra Media Utama
- Purba , M.D. 1977. *Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun*. Medan: M.D. Purba.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sadyohutom, Mulyono. 2008. *Menejemen Kota Dan Wilayah*. Bandung: PT Bumi Aksara

Saleh dkk. 2004. *Ryaas Rasyid Percikan Pemikiran Sang Pengagas Otonomi Daerah (Versi Media Massa)*. Jakarta: Belantika.

Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group..

Solihin, Dadang. 2001. *Kamus Istilah Otonomi Daerah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

Suryadi, Budi. 2007. *Sosiologi Politik (Sejarah, Defenisi, dan Perkembangan Konsep)*. Yogyakarta : IRCiSoD.

Walgito, Bimo. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset

Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 1999 *Tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun*

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Dearah berupaya mencari keseimbangan antara kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, pasal 1

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1)

MENTERI DALAM NEGERI RI NO. 4/1980

